

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH YOGYAKARTA DI MASA NEW NORMAL

Deva Armadya Sadesta (mahasiswa)¹, Selvia Mahatma Cindi (mahasiswa)², Risky Aldian (mahasiswa)³, Robby Darwis Nasution (dosen pembimbing)⁴

1. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo*
[*devaarmadya6@gmail.com*](mailto:devaarmadya6@gmail.com)
2. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo*
[*selviamahatmacindi@gmail.com*](mailto:selviamahatmacindi@gmail.com)
3. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo*
[*riskyaldian57@gmail.com*](mailto:riskyaldian57@gmail.com)
4. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo*
[*robbydarwisnasution@gmail.com*](mailto:robbydarwisnasution@gmail.com)

ABSTRACT

The current Covid-19 pandemic is being felt by the government and the public, especially those in urban areas. Since the beginning of the pandemic until now, it has had a very bad impact on all aspects of life. such as, public services, health, education, employment, social, political, and economic. The Covid-19 pandemic has had a negative impact on the social life of people in Indonesia, the government echoed a new lifestyle or new normal which resulted in restrictions or temporary suspension of public services which were eventually replaced with online technology. This is affirmed by the rise of the possibility of the Modern Upset 4.0 as of late. The public authority is needed to be versatile and ready to improve innovation in serving the local area. Also amidst the Coronavirus pandemic, which powers individuals to restrict their portability and are encouraged to do exercises at home to stop the spread of the infection. In this condition, the presence of taxpayer supported organizations should quickly change into online structure. The utilization of innovation in broad daylight benefits today is essentially not another thing, the Local Government as an administration that is in direct contact with the local area has carried out open administrations through applications and online frameworks, for example, during the time spent overseeing populace records, one of which is in Yogyakarta. In any case, the utilization of innovation openly benefits is as yet not ideal so that its execution isn't as per new ordinary conditions. This examination was led utilizing subjective exploration strategies with a graphic investigation writing concentrate on where the information assortment process was brought out via looking through auxiliary information sources, for example, diary articles, current news, optimal so that its implementation is not in accordance with new normal conditions. This research was conducted using qualitative research methods with descriptive analysis literature studies where the data collection process was carried out by conducting searches through secondary data sources such as journal articles, current news, and policy briefs. Which aims to determine the quality of Yogyakarta government public services in the new normal by using a literacy study approach.

Keywords : Public service, New normal, Local government

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 saat ini sangat dirasakan oleh pemerintah maupaun masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah perkotaan. Sejak awal pandemi hingga sekarang sangat membawa dampak buruk terhadap segala aspek kehidupan. seperti, pelayanan public, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sosial, politik, dan ekonomi. Pandemi Covid-19 telah membawa dampak buruk pada kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, pemerintah menggaungkan pola hidup baru atau new normal yang berimbas pada pembatasan atau pemberhentian pelayanan publik sementara yang akhirnya diganti dengan teknologi online. Hal ini ditegaskan dengan munculnya kemungkinan Modern Upset 4.0 akhir-akhir ini. Otoritas publik dibutuhkan untuk bersikap fleksibel dan siap meningkatkan inovasi dalam melayani daerah. Juga di tengah pandemi Coronavirus, yang memaksa individu untuk membatasi portabilitas mereka dan didorong untuk melakukan latihan di rumah untuk menghentikan penyebaran infeksi. Dalam kondisi ini, keberadaan organisasi pendukung wajib pajak harus segera berubah menjadi struktur online. Pemanfaatan inovasi dalam manfaat siang bolong saat ini pada hakikatnya bukan hal lain, Pemerintah Daerah sebagai pemerintah yang bersentuhan langsung dengan daerah telah melakukan administrasi terbuka melalui aplikasi dan framework online, misalnya selama ini melakukan pengawasan terhadap masyarakat. rekor, salah satunya di Yogyakarta. Namun, pemanfaatan inovasi secara terbuka manfaatnya masih belum ideal sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi new normal. Penelitian ini dipimpin menggunakan strategi eksplorasi subjektif dengan fokus penulisan investigasi grafis di mana proses pengumpulan informasi dibawa melalui pencarian melalui sumber informasi tambahan, seperti artikel diary, berita terkini, dan policy brief. Yang bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pemerintah Yogyakarta di masa new normal dengan menggunakan pendekatan studi literasi.

Kata Kunci : Pelayanan public, New normal, Pemerintah daerah

I.PENDAHULUAN

Kemungkinan perubahan birokrasi 22 Tahun bergema di Indonesia dan mengalami berbagai jenis kemajuan, model untuk gerakan maju mundur penerapannya. Perubahan yang berbeda dalam kerangka organisasi negara, pembaruan pendirian perhimpunan tinggi negara, dan pilihan umum dilakukan untuk menghimpun organisasi negara yang dapat berjalan dengan baik (organisasi besar). Salah satu semangat di balik perubahan administratif adalah berurusan dengan gagasan organisasi untuk individu dan desain manajerial yang percaya diri, proaktif, dan kuat meskipun ada globalisasi dan komponenpenting dari perubahan reguler. Sehingga Sangat mungkin terlihat bahwa untuk alasan ini, masyarakat adalah pesta yang merupakan penjelasan utama itu adalah fundamental perubahan dalam kerangka administrasi Indonesia. (Radelet, 1999, hlm. 39-70)

Saat ini, kondisi pengelolaan kebijakan di Indonesia masih jauh dari yang disengketakan. Sejauh administrasi publik pemerintah belum memiliki pilihan untuk

menawarkan dukungan yang besar kualitas seperti yang ditunjukkan oleh kemajuan kebutuhan daerah setempat. Ini sangat baik dapat dilihat dari tinjauan kehormatan (KPK Inovatif, 2010) dilakukan oleh Komisi Penghancur Kekotoran batin (KPK) yang menunjukkan bahwa sifat implementasi kebijakan di Indonesia baru-baru ini telah mencapai titik puncak skor 6,64 dari 10. Skor keaslian ini menunjukkan ciri-ciri nilai dalam implementasi kebijakan, seperti ada atau tidaknya angsuran, terlepas dari apakah ada Metodologi Kerja Standar (SOP), kesesuaian teknik administrasi dengan SOP saat ini, transparansi data, kewajaran, dan kecepatan dalam angkutan administrasi, dan akomodasi daerah dalam mengajukan pertanyaan.

Realitas saat ini di lapangan menyatakan bahwa praktik regulasi saat ini masih diserbu oleh asosiasi perspektif yang lama dan kusut. Demikian pula, praktik-praktik yang merosot. Terlebih lagi, masih banyak terjadi dalam berbagai pelaksanaan manajemen kebijakan oleh asosiasi pemerintah. Ombudsman RI mencatat 5.800 masalah yang terjadi dalam implementasi kebijakan di seluruh daerah di Indonesia. Setelah delapan tahun, pada 2019 jumlah kasus pasti bertambah menjadi 7.903 laporan. Dari laporan tersebut, 5.464 laporan telah didaftarkan dan ditindaklanjuti, sedangkan sisanya masih dalam kajian material. Penambahan penundaan maladministrasi benar-benar memicu protes, bukan? lemah ada sekitar 1.837 kasus, atau sebaliknya sekitar 33,62 persen dari protes habis-habisan. Diikuti oleh contoh ledakan terhadap strategi, 1.583 laporan dan perkelahian tidak menawarkan bantuan untuk lebih dari 967 keberatan. Substansi laporan aduan sebagian besar dipermasalahkan oleh wilayah agraris/pertanahan, dengan jumlah 865 perkelahian. Bagian pekerjaan berikutnya adalah 749 protes, wilayah sekolah lebih dari 558 pengaduan, bidang kepolisian lebih dari 551 protes, bidang asosiasi individu adalah 249 protes dan di ruang kerja lebih dari 184 pengaduan. Untuk perkumpulan terbuka itu sendiri dikendalikan oleh perkumpulan-perkumpulan pemerintah alam, disusul oleh administrasi-administrasi, kepolisian dan administrasi agraria dan tempat kerja penyiapan tata ruang/tanah umum (Humas Ombudsman, 2020).

Pakar publik tidak benar-benar berpartisipasi hanya tinggal di sana tanpa tugas, berniat untuk memotong organisasi terbuka mulai tahun 2000-an. Tentu saja, perspektif termasuk kemajuan dalam istilah bantuan masyarakat juga telah dibicarakan oleh aturan tentang Pemerintah Terdekat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dimana dalam pasal 386 sampai dengan 390 melibatkan spesialis masyarakat lingkungan untuk lebih mengembangkan organisasi dengan melaksanakan kreasi dan kemajuan logis. Selain itu,

dokter umum juga sedang menyelesaikan program 100 kota metropolitan di berbagai daerah di Indonesia. Padahal baru-baru ini hanya ada 125 orang di sekitar yang telah mengeksekusinya. Aplikasi kota yang brilian semakin sesuai dengan status peningkatan inventif saat ini yang memadai untuk menyelesaikan masalah lokal. Tidak hanya di level manajerial Lembaga Penilaian Kemajuan Sistem Bantuan Umum Yogyakarta Untuk Menghadapi Yang Baru (Dhiya Sholiha Husnayaini, dan Rosalina Woro Subektie) 43 organisasi, saat ini semua perdagangan mulai dari file, mencari kebutuhan sehari-hari hingga akun memiliki pilihan untuk diselesaikan dengan kemajuan online. Orang dapat melakukan banyak aktivitas hanya dengan menekan PDA unik mereka. Melihat ini, spesialis publik perlu bekerja lebih banyak untuk membuat organisasi lebih cepat dan efektif. Apalagi di masa Covid yang sudah berubah dan menuntut sistem baru di berbagai bidang. Pemanfaatan e-organization terus menjadi jalan dasar bagi kehadiran perkumpulan yang digerakkan oleh warga di lingkungan sekitar yang terus mengajukan unjuk rasa, misalnya isolasi ramah atau penolakan sosial dan isolasi aktual, akhir sosial dengan menjaga jarak produktif.

Beberapa daerah mulai membatasi organisasi dengan mengurangi total jam buka, mengurangi total pengunjung dan mengurangi banyak tempat agar dapat melakukan pembatasan nyata. Apa pun seperti mengurus biaya, hingga pembuatan akta kelahiran dan laporan, lainnya bisa dilakukan dengan memanfaatkan website atau bahkan aplikasi whatsapp. Simak berbagai perubahan untuk terus melakukan pendampingan agar sangat menarik minat untuk kedepannya, pada saat itu, dilaksanakan lebih lanjut, salah satunya Yogyakarta. Beberapa waktu sebelumnya, Yogyakarta dinobatkan sebagai kota dengan penanganan terbaik dari Covid (Bramasta, 2020)

II. METODE

Penelitian ini diarahkan oleh strategi untuk ujian artistik di mana metode yang terlibat dengan pengambilan informasi selesai dengan melihat melalui sumber informasi opsional misalnya, artikel buku harian, berita terkini dan informasi tambahan lainnya yang penting dengan tema yang diangkat dalam eksplorasi ini, sama seperti membaca dan menguraikan dari ringkasan strategi yang dibuat oleh berbagai organisasi untuk memberikan garis besar saran yang ada dari kondisi yang ada. Dari daftar yang diindeks, itu adalah pemeriksaan informasi yang diadakan melalui pemeriksaan yang menarik untuk mencapai kesimpulan sebagai saran untuk organisasi pemerintah daerah dalam menyelesaikan pemerintahan publik selama pandemi.

III. STUDI KEPUSTAKAAN

Otoritas publik harus fleksibel dan siap untuk memajukan inovasi dalam melayani daerah. Juga di tengah situasi Coronavirus yang memaksa individu untuk membatasi portabilitas mereka dan didorong untuk melakukan latihan di rumah untuk memutus infeksi. Dalam kondisi ini, keberadaan organisasi yang digerakkan oleh pembayar pajak harus segera berubah menjadi struktur yang intens. Penggunaan inovasi di masyarakat saat ini pada dasarnya bukan hal lain, Pemerintah Daerah sebagai organisasi yang didorong oleh wajib pajak langsung dengan daerah setempat telah mengeksekusi orang pada umumnya melalui aplikasi dan kerangka kerja yang kuat, misalnya, selama waktu yang dihabiskan untuk mengawasi catatan kependudukan, satu salah satunya di Yogyakarta. Meski demikian, pemanfaatan inovasi di pemerintahan terbuka ini masih belum ideal sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi new normal. Eksplorasi ini diarahkan dengan menulis berkonsentrasi pada strategi dengan investigasi memukau. Dari studi penulisan, ditemukan satu teknik untuk meningkatkan proses bantuan publik, yaitu yayasan e-government khusus sebagai kerangka bantuan publik yang terintegrasi dari otoritas publik untuk pengaturan data dan administrasi publik. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi hotspot yang relevan bagi pembuat strategi ASN di Indonesia dengan memberikan saran agar rencana e-government dapat dijalankan untuk memberikan akses yang mudah ke daerah dan meningkatkan kelangsungan kerja dan kesejahteraan ASN untuk menghadapi kebiasaan baru.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi kecenderungan baru dalam implementasi kebijakan dan Covid di Yogyakarta.

Kerangka kerja bantuan publik yang dilakukan oleh otoritas publik saat ini sebenarnya menghadapi banyak kesulitan dan masalah. Perasaan yang ditambahkan ke wilayah lokal sampai saat ini ketika mereka mengetahui administrasi publik adalah bahwa mereka berbelit-belit dan menghabiskan sebagian besar hari. Meski telah berulang kali dan mulai melaksanakan kemungkinan e-government melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Implementasi Kebijakan dan digitalisasi berbagai bidang bantuan publik, jalannya administrasi arsip tertentu justru memakan banyak biaya, hari dan merupakan siklus yang membingungkan. Sementara administrasi publik melalui digitalisasi melalui situs dan aplikasi di daerah tertentu masih belum ideal karena kebutuhan SDM, baik pegawai daerah maupun pegawai pemerintah yang kurang kompeten, akses kekuasaan dan web masih

terbatas, hanya sebagai ide dan manajemen dari pertemuan yang berbeda yang tidak sesuai pedoman. persyaratan pihak yang terikat (Kuncana, 2020)

Triwulan utama tahun 2020 merupakan awal dari perbaikan kasus Covid di Indonesia, yang memancing para spesialis publik untuk memberikan metodologi lain sebagai tanggapan. Berdasarkan pola penemuan artikel ini, Indonesia hingga saat ini memiliki angka absolut kasus Covid 100.303 dengan kasus sembuh lebih dari 58.173 orang dan angka kematian lebih dari 4.838 orang. Sementara itu, total tes yang diselidiki muncul di 516.865 model. Berawal dari kepastian penyebaran Covid sebagai kegagalan publik melalui Wacana Kepala Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang tergabung dalam Asistensi Umum VOL. 14, No. 2 November 2019: 1-10 44 Permohonan bantuan pemerintah menunjukkan, misalnya, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah-daerah dengan kasus yang sangat besar, hingga memasuki perubahan mode terkini (ABK). Peningkatan kasus Covid di Yogyakarta sendiri secara umum akan lebih lambat dibandingkan beberapa daerah lain. Hingga Juli 2020 jumlah kasus Covid di Yogyakarta tercatat 772 kasus positif terkonfirmasi, dengan 434 kasus sembuh dan 21 orang ditandang (Organisasi Unprecedented Yogyakarta, 2020). Teknik yang dibuat oleh pemerintah setempat karena situasi Covid menentukan pengaruh tempat pemerintah lingkungan, asosiasi tersebut mulai saat itu dan seterusnya, bergabung dengan tindakan Covid untuk mengelola kelompok yang dipilih oleh beberapa orang. Pos-pos persepsi bersama terhadap lonjakan jamaah, sangat mirip dengan nasihat acara bantuan pemerintah untuk semua tingkat pemerintah lingkungan yang terkait (Risdiyanti et al., 2020).

Variasi pola baru dan mendukung yang digambarkan sebagai operasi baru pabrik akhir-akhir ini belum dilakukan. Hal ini dikarenakan rendahnya kedisiplinan daerah dan minimnya penghiburan pemerintah sebagai sistem pencegahan penyebaran Covid. Sambil mempertimbangkan abstrak eksplorasi Bank Dunia, ada beberapa jenis acara bantuan pemerintah yang merupakan ciri disiplin seluruh masyarakat. Selain menjalankan misi tentang pentingnya cuci tangan dan mewajibkan penggunaan penutup di ruang terbuka, ada jaminan untuk menyelesaikan akhir yang damai. Pelaksanaan pembatalan sosial sebenarnya perlu dilakukan oleh pemerintah lingkungan sebagai penunjukan dari pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan lingkungan jaminan bahwa disiplin dapat diterapkan oleh semua lapisan masyarakat.

Ada titik potong besar untuk melaksanakan penolakan sosial, termasuk I) telecommute memastikan untuk panggilan berguna di rumah, ii) berakhir dari asosiasi tertentu, dan iii) pembatasan perjalanan (Bank Dunia, 2020, hlm. 36). Dari batas-batas tersebut, ada kesungguhan bagi negara-negara bagian terdekat untuk memiliki pilihan untuk berjabat tangan dengan ramah melalui perkembangan kemajuan informasi pada organisasi terbuka. Sebagai wujud dari upaya fokal pemerintah, dalam mencermati bagian-bagian dan pelaksana pengelolaan kebijakan di masa pandemi ini, negara terdekat perlu menemukan strategi-strategi best practice dan sejauh mana tepat pelaksanaan acara bantuan pemerintah diperlukan di Yogyakarta. Mengandalkan kekuatan Covid juga dapat menjadi titik balik bagi otoritas publik dengan Yogyakarta untuk membuat struktur kemajuan informasi yang sesuai dengan klasifikasi motivasi yang disajikan oleh publik yang dapat menyesuaikan dengan berbagai bidang pola seperti kecenderungan baru.

Pemanfaatan inovasi di bidang pendampingan masyarakat pada dasarnya tidak lain bagi pemerintah daerah Jogja Istimewa. (Lakukan Area Sendiri). Sebagai daerah dengan penghargaan Top 99 Public Support Progress Progress tahun 2019 dikoordinir oleh Badan Penguatan Kontrasepsi Negara dan Perubahan Regulasi (Humas MenpanRB, 2019).

Pemerintah Yogyakarta memiliki batas aset manusia cukup untuk merampingkan inovasi data dalam dukungan masyarakat umum. Sangat disayangkan, ketika angka Kasus virus corona mulai melonjak di Yogyakarta, mayoritas administrasi publik kebutuhan dasar masyarakat masih membutuhkan kehadiran yang sebenarnya dengan kekambuhan cukup gencar untuk diperbaiki menangani laporan khusus ke kantor terkait. Dalam penyelidikan yang dilakukan di kantor-kantor tertentu, pemanfaatan disiplin konvensi kesejahteraan di Yogyakarta masih dibatasi di kurang lebih pengaturan sementara misalnya ajakan cuci tangan, estimasi suhu melalui termogun, sama seperti pelaksanaan strategi penghapusan sosial seperti area lounge yang direncanakan dengan bentang tertentu (Risdiyanti et angkatan laut(AL), 2020).

Pelayanan Publik Masyarakat Yogyakarta

Guna menjamin kesesuaian administrasi publik untuk wilayah lokal di masa pandemi, tugas ASN dalam menyikapi kegiatan eksekusi menyesuaikan kecenderungan baru seperti yang ditunjukkan oleh konvensi kesejahteraan harus diselesaikan untuk membatasi efek penyebaran Virus corona. Memberi cakupan dan penghindaran perawatan kesehatan dari Covid, Pemerintah Kawasan Wilayah Do- It- Yourself membuat beberapa gerakan dimulai

dengan arahan umum yang diberikan oleh perwakilan utama, sama secara eksplisit di kantor-kantor pemerintah wilayah eksplisit sepenuhnya bertekad untuk memulai menciptakan transformasi kecenderungan baru dalam organisasi pemerintah terdekat. Kemudian, pada disaat itu, Pemerintah Provinsi Do- It- Yourself juga dikirim dari situs yang berisi data penyebaran virus corona di Yogyakarta sebagai kategori korespondensi dan keterusterangan tentang informasi kasus Coronavirus, sama seperti tahapan secara eksplisit untuk penyaringan diri dan memberikan pelatihan tentang bahaya keterbukaan apa lagi lapor diri bila terkontaminasi Virus corona.

Menurut kemajuan pilihan pemerintah pusat dan terdekat untuk memulai Memasuki tahap modifikasi kecenderungan lai maupun di sisi lain biasa baru pada dasarnya tidak terlepas dari persyaratan untuk pemulihan moneter sesudah menghadapi kemacetan kayu di Q1 juga Q2 2020. Kondisi keuangan Wilayah Yogyakarta yang masih tegak oleh area kasual dan industri perjalanan memunculkan pemikiran jika dalam untuk mengikuti kondisi keuangan, pemerintah terdekat memilih untuk mulai membuka beberapa lini bisnis untuk pengelolaan keuangan, sehingga Sementara itu, pengelolaan diperlukan administrasi publik untuk organisasi sehingga penghibur bisnis dapat mengambil bagian dalam cegah penyebaran Coronavirus tanpa penundaan sesaat mengikuti perekonomian(Risdiyanti et al., 2020, hal. 52)

Beberapa kantor pemerintah daerah mulai meningkatkan inovasi data selama waktu yang dihabiskan untuk mengawasi laporan tentu, misalnya, kantor pertolongan otorisasi yang melaksanakan komponen cetak dari rumah, aplikasi terkoordinasi untuk menyampaikan, papan dan proses data, terhadap pemanfaatan APD bahan Berbahaya untuk perekam e- KTP(Wijana, 2020).

Berikutnya adalah tabel struktur administrasi bantuan publik yang diselesaikan oleh otoritas publik lokal Yogyakarta sesuai Virus corona :

Tabel 1 Daftar Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam merespons Covid-19

Pelayanan Publik	Instansi Pemerintah	Deskripsi
Website corona.jogjaprov.go.id	Pemerintah	Situs penyedia data dan informasi terkait

	Provinsi	persebaran virus corona di wilayah Yogyakarta, serta data lainnya terkait himbauan pemerintah terdekat terkait virus corona.
Aplikasi Jogjapass	Pemerintah Provinsi	Ini adalah tahap penyaringan diri untuk mengenali dan melaporkan ketika terkontaminasi virus Corona. Ada elemen yang menyertainya <ol style="list-style-type: none"> 1. penyaringan diri 2. Pengecekan langsung 3. Tes penilaian bahaya 4. Sinyal untuk tanggap darurat
Pelayanan perizinan print from home	DPMP Kota Yogyakarta	Ini adalah program DPMP Kota bagi calon penerima hibah untuk memiliki opsi untuk mengajukan print from home untuk dokumen yang berhubungan dengan otorisasi aplikasi di DPMP Kota Yogyakarta sehingga mengurangi terulangnya pendaratan langsung di kantor DPMP Kota Yogyakarta
Administrasi pembuatan arsip organisasi kependudukan melalui whatsapp dan aplikasi Jogja Brilliant Assistance	Disdukcapil Kota Yogyakarta	Ini adalah program Disdukcapil bagi calon pelamar untuk mengajukan pencatatan melalui whatsapp atau melalui aplikasi Bantuan Cerdik Jogja. Administrasi online diberikan untuk aplikasi KK, KIA, KTP dan Pindah Penduduk. Masih ada administrasi mata ke mata untuk beberapa kondisi luar biasa

Selain pemerintahan tersebut, organisasi pemerintah provinsi Yogyakarta secara keseluruhan juga melaksanakan konvensi kesehatan, seperti memberikan daerah untuk cuci tangan dengan pembersih, menggunakan thermogun, melaksanakan ramah tamah dengan berhenti di tempat duduk, membuat sudut yang nyaman untuk pejabat dan daya tarik untuk menggunakan selimut untuk pejabat dan tamu (Bramasta, 2020). Saat ini pemerintah lingkungan Yogyakarta sedang merencanakan SOP yang akan diterapkan selama rentang waktu variasi untuk kecenderungan baru (Risdiyanti et al., 2020, hlm. 47).

Evaluasi Sistem Pelayanan Publik

Mengingat perintah dari Menpan RB, administrasi publik dari semua organisasi otoritas publik akan terus bekerja sebagai peraturan selama pandemi. Bagaimanapun kerangka kerja yang dapat menentukan kesejahteraan umum tanpa kompromi keterampilan regulasi yang ada. Aplikasi konvensi kesejahteraan secara terbuka menguntungkan menghitung dengan membatasi latihan pertemuan dan acara megah tertentu apa lagi meningkatkan pemanfaatan media- media maupun situs berbasis web dalam mencerahkan pengaturan dan pedoman baru(Taufik and Warsono, 2020).

Pelaksanaan konvensi kesejahteraan di lingkungan instansi pemerintah Yogyakarta saat ini sudah sangat lengkap, terutama terkait dengan penataan ruang cuci tangan, himbauan penggunaan selimut bagi seluruh pegawai dan tamu, hingga permohonan pisah sambut dengan mengawasi antrean sedemikian rupa. agar tidak menimbulkan kerumunan di tempat kerja kantor lokal. . Namun, sejauh konvensi regulasi, beberapa administrasi publik belum mampu memberikan kerangka kerja yang dalam jangka panjang dapat menangani keadaan pandemi yang berkepanjangan. Melihat jumlah positif Virus Corona di Yogyakarta dan Indonesia yang terus meningkat, serta peluang kondisi Virus Corona di Indonesia yang hingga saat ini masih belum mampu untuk menekan jumlah kasus virus Corona secara konsisten, maka diperlukan suatu metodologi dengan titik dukung pandangan untuk administrasi publik oleh ASN Yogyakarta.

Dari beberapa pertanyaan yang telah diselesaikan, ada ringkasan strategi dan artikel yang memberikan saran untuk pedoman bantuan publik selama Pandemi yang dirangkum sebagai berikut :

Tabel 2 Perbandingan Rekomendasi Pelayanan Publik bagi ASN di Masa Pandemi

ILO Sectoral Brief	UN/DESA	Komisi Aparatur Sipil Negara
a. Meningkatkan anggaran pelayanan kesehatan secara substansial dengan penyesuaian anggaran lain; b. Mendesak masyarakat untuk tetap dirumah dan menjaga jarak satu sama lain ketika terpaksa	a. Memastikan kesinambungan layanan publik; b. Memberikan layanan bagi masyarakat sebelum diri sendiri: keberanian dan kemanusiaan dalam menjalankan pekerjaan; c. Berpikir cepat, kreatif dan	a. Penerapan birokrasi digital dalam rangka memberikan informasi penanganan Covid-19 dan way of service yang efektif, cepat dan responsif kepada masyarakat b. Standarisasi pelayanan: kebijakan pelayanan, profesionalisme pelayanan,

<p>bepergian;</p> <p>c. Memerintahkan penutupan usaha dan layanan publik yang tidak esensial;</p> <p>d. Memberikan perintah bagi ASN untuk bekerja dari rumah dengan menggunakan teknologi yang tersedia;</p> <p>e. Menawarkan pelayanan publik melalui daring;</p> <p>f. Memantau pergerakan individu yang diduga terjangkit virus serta melakukan serangkaian tes untuk orang disekitarnya</p>	<p>berinovasi;</p> <p>d. Informasi yang akurat dan dapat diandalkan dan kesadaran atas situasi yang terjadi ;</p> <p>e. Berpikir strategis dan membuat perencanaan dalam masa krisis;</p> <p>f. Mempertahankan ketangguhan dan membangun layanan publik yang lebih efektif dan responsif;</p> <p>g. Membangun dan meningkatkan legitimasi, kredibilitas pemerintah, dan kepercayaan masyarakat;</p> <p>h. Alokasi dan akuntabilitas distribusi sumber daya;</p> <p>i. Kolaborasi dan jejaring kepemimpinan</p>	<p>sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan publik;</p> <p>c. Profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparatur</p>
--	--	---

Sumber : olahan penulis dari (ILO, 2020; Kauzya & Niland, 2020; Wibowo, 2020)

Berdasarkan tabel 2, hal itu dapat terlihat dengan jelas dalam saran yang diperkenalkan ada kebutuhan area lokal untuk pengelolaan bantuan publik. Mengingat pengaturan singkat UN DESA untuk memahami ASN yang layak bisa bertindak sebagai inovator nanti Keadaan darurat ini membutuhkan strategi yang tepat selanjutnya jauh menjangkau sehingga otoritas publik dapat memastikan persyaratan area lokal dan membuat sistem biologis ASN yang solid wajar (Kauzya dan Niland, 2020, hal. 1). Energi pandemi ini bisa jadilah tahap awal perubahan administrasi di Yogyakarta di gedung yayasan bantuan publik yang kokoh untuk mengelola keadaan darurat yang terjadi dan digabungkan untuk memberikan lingkungan bantuan publik yang ideal untuk masyarakat umum variasi dari kecenderungan baru. Juga disampaikan kepada saran ILO dan Komisi Perangkat Umum Negara Bagian, administrasi publik dengan kerangka kerja berbasis web adalah sebuah panggung mulai membuat masyarakat umum bahwa kuat meski ada pandemi dengan demikian dapat menambah menurunkan jumlah positif Coronavirus (ILO, 2020; Wibowo, 2020).

Kebenaran bantuan publik yang terjadi di Yogyakarta sambil berlari tipikal baru dalam pandangan Bundaran Ketua Kota Nomor: 061/978/SE/2020 tentang Kerangka Kerja Perwakilan dalam Calamity Crisis Reaction Stayus Virus Corona di Pemerintah Daerah Yogyakarta mengedukasi keberadaan administrasi online. Ini bermaksud untuk mengurangi dan Jauhi bantuan pribadi dan dekat. Hal ini diakui dengan adanya administrasi populasi dan hibah selesai melalui situs dan korespondensi melalui telepon dan media online. Ketika untuk merekam informasi populasi misalnya KTP-el dan KIA-el sudah jadi tunda sebelumnya selain dari pemula dan kebutuhan krisis. Administrasi berbagai latihan yang dilakukan oleh pemerintah terdekat Yogyakarta tentang perubahan kondisi selama pandemi juga selesai oleh Tempat Kerja Perpustakaan dan File Kota Yogyakarta yang membuka pemerintahan memperoleh dan mengembalikan buku melalui Metode untuk Mendapatkan dan Kembali Perpustakaan Langsung Tanpa Menjatuhkan dari Kendaraan (Saparatu) selesai untuk sampai pada penerimaan sederhana untuk daerah setempat, khususnya masuk ke administrasi prema memastikan pengiriman buku tulang punggung klien. Bantuan ini dapat dilakukan dengan menghadirkan aplikasi administrasi melalui whatsapp dan telepon soliter membutuhkan Kartu Karakter/Surat Izin Mengemudi/ Partisipasi dari Asosiasi yang dianggap sah publik sebagai jaminan kredit.

V. KESIMPULAN

Mengingat eksplorasi yang telah selesai, pemerintah terdekat Yogyakarta telah melakukan pendekatan pemanfaatan imajinatif e-government untuk memuluskan organisasi yang didorong oleh pembayar pajak wilayah selama pandemi virus corona. Kasus Ini diakhiri dengan memberi administrasi yang kuat melalui penataan situs, satu tahap lagi yang kuat, meskipun tetap menawarkan dukungan langsung dengan melaksanakan konvensi kesejahteraan. Bagaimanapun, reaksi yang dibuat masih tidak mendorong pengaturan yang berlarut-larut dan belum membuat framework tidak bercacat dan mewajibkan konvensi kesejahteraan esensial, lebih spesifik dengan menawarkan jenis bantuan publik . Saran untuk Pemerintah Yogyakarta adalah kerangka kemajuan memasukkan administrasi publik dengan memanfaatkan energi pandemi yang terjadi saat ini, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi jumlah Coronavirus di Yogyakarta dan untuk membuat kerangka bantuan publik mendukung (masuk akal).

VI. SARAN

Saran penelitian untuk ASN dan Mitra Pemerintah Daerah Yogyakarta untuk situasi ini adalah :

- 1) Melakukan bauran manajerial dan normalisasi lebih ke arah mendukung daya dukung selama pandemi.
- 2) menilai penilaian langsung batin dari kerangka bantuan publik selama pandemi secara konsisten, mengingat memajukan batas inovasi data yang dimilikinya.
- 3) Pembukaan ide dan reaksi pemerintah daerah di tempat sebagai bentuk konsumsi keinginan di dasar Bantuan Umum sebagai apa yang akan datang
- 4) Bekerja pada bantuan terbuka dengan menciptakan dan mengembangkan lebih lanjut kerangka kerja bantuan publik dengan memimpin percakapan dan kemajuan di antara kantor dan lokal untuk memutuskan administrasi publik berbasis internet jangka panjang dan dapat dikelola.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Buku Radelet, S. (1999). Indonesia : Long Road to Recovery. Artikel Jurnal Huang, I. Y.-F. (2020).

Data Terkait COVID-19 di D.I. Yogyakarta. <https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik>
Wardhani, C. M. (2020). Cegah COVID-19 Disdukcapil Kota Optimalkan Layanan Online.

Fighting Against COVID-19 through Government Initiatives and Collaborative Governance. *Public Administration Review*, 80(4), 665–670.

ILO Sectoral Brief : COVID-19 and the Public Service. Kauzya, J.-M., & Niland, E. (2020).

Indonesia Economic Prospects, July 2020 : The Long Road to Recovery. Daring Bramasta, D. B. (2020, July 18). Melihat Penanganan Covid-19 di 5 Provinsi yang Disebut Terbaik oleh Presiden Jokowi.

Kuncana, G. (2020). Ombudsman RI Sadari Pelayanan Publik Masih Kurang. <https://investor.id/national/ombudsman-ri-sadari-pelayanan-publik-masih-kurang> Litbang KPK. (2010).

Risdiyanti, I., Khusniah, K. W., Prasetya, J. D., Mubarak, L., Akdom, A. M., Halim, W., Mamao, Y., Hermawan, B., Horlin, N., Ghifari, D. Al, Widhantara, A., Atikah, G. A., Awami, D. K., Rahayu, L. D., Ismoyo, D., Pasarua, E. H., Walid, C. Bin, Madisa, R. S., Rohman, N., & Fajriah, M. N. (2020). Kajian dan Kertas Posisi Respon Penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. World Bank. (2020).

Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1–18. Report ILO. (2020).

The Role of Public Service and Public Servants During the COVID-19 Pandemic (No. 79; Policy Brief).

Ombudsman RI Luncurkan Laporan Tahunan 2019. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-laporan-tahunan-2019>

Survei Persepsi Masyarakat terhadap Korupsi dan KPK tahun 2010. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/kajian-dan-penelitian-2/531-survei-persepsi-masyarakat-terhadap-korupsi-dan-kpk-tahun-2010> Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020).

Wibowo, P. (2020). Birokrasi Selama Masa Pandemi. <https://www.kasn.go.id/details/item/570-birokrasi-selama-masa-pandemi> Wijana, P. E. (2020). Sleman Kembali Layani Rekam e-KTP, Petugas Bakal Pakai APD Hazmat. <https://jogja.suara.com/read/2020/06/01/114500/sleman>

Young, L. K., & Natasha, G. (2019). Speedy Public Service: How Can Indonesia Realize It. *Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/10/14/speedy-publicservic>

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah

Surat Edaran Nomor 800/5316 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta